

PENERAPAN JURNALISME DAMAI DALAM PEMBERITAAN KUDETA MYANMAR DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM

Ulima Sri Amelia¹, Dewi Sukartik²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ulimasriamelia1@gmail.com

ABSTRAK

Kudeta Myanmar kembali terjadi, kelompok militer mengambil alih kekuasaan negara. Hal ini tak luput dari kacamata dunia, dan di sini lah media mengambil peran besar dalam menggiring pandangan serta opini khalayak. Media mestinya menjadi pelopor damai. Maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Jurnalisme Damai dalam pemberitaan kudeta Myanmar di media *online* Kompas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model *framing* dari Robert Entman. Hasilnya menunjukkan Kompas.com membingkai kudeta sebagai masalah krusial yang menyangkut keselamatan banyak nyawa. Secara garis besar Kompas.com tampak sudah menerapkan Jurnalisme Damai. Namun jika ditilik lebih dalam, Kompas.com masih terindikasi adanya opini subyektif dan diksi judul yang mengarah pada provokasi atau orientasi kebenaran.

Kata kunci: Jurnalisme Damai, Kudeta Myanmar, *Framing* Entman, Kompas.com

ABSTRACT

Myanmar coup d'etat again, military groups take over state power. This is inseparable from the world's eyes, and this is where the media plays a big role in guiding the views and opinions of the public. Media Be a pioneer of peace. So the purpose of this study is to find out how the application of Peace Journalism in reporting the Myanmar coup in the online media Kompas.com. This study uses a qualitative descriptive method with a framing model from Robert Entman. The results show that Kompas.com framed the coup as a crucial issue involving the safety of many lives. In general, Kompas.com seems to have implemented Peace Journalism. However, if we look more deeply, Kompas.com still indicates that there are subjective opinions and title dictions that lead to provocation or truth orientation.

Keywords: Peace Journalism, Myanmar Coup, Framing Entman, kompas.com

Pendahuluan

Negara Myanmar atau yang dahulu bernama Burma kembali mengalami kekacauan kudeta militer setelah 10 tahun sebelumnya baru merasakan angin segar dari sebuah demokrasi. Kudeta sendiri dapat dikatakan sebagai perubahan rezim baru dari rezim sebelumnya dengan cara paksa. Pada awal kemerdekaan, Myanmar menjalankan pemerintahan secara demokratis dibawah pemerintahan sipil U Nu dengan sistem parlementer. Kemudian, pada tahun 1960 Myanmar melakukan Pemilihan Umum dengan bantuan pengamanan militer dari anggota Jenderal Ne Win. Dari sinilah awal mula ikut campurnya pihak militer dalam kenegaraan (Apriyanti, 2013). Kini seperti yang diketahui dunia, tepat 1 Februari 2021 lalu pihak militer kembali merebut kendali negara Myanmar setelah partai NLD dinyatakan menang dalam pemilu. Junta militer menuding adanya kecurangan dalam proses pemilu, dan menuntut diadakannya pemilihan ulang. Tokoh-tokoh besar seperti Suu Kyi dan pejabat NLD pun akhirnya ditahan (Kompas.com, n.d.-a).

Problematika kudeta militer di Myanmar ini sangat menarik perhatian dunia. Selain karena ini bukanlah kudeta yang pertama kali, juga karena banyaknya korban yang berjatuh. Berdasarkan data dari salah satu kelompok advokasi di Myanmar, yaitu AAPP (Asosiasi Tahanan Politik) sekitar 877 orang telah kehilangan nyawa akibat pasukan keamanan, dan lebih dari 6.000 orang sudah dipenjarakan sejak kudeta terjadi (Kompas.com, n.d.-b). Berbagai media di Indonesia tak ketinggalan menyoroti permasalahan ini. Media *online* menjadi pilihan yang paling banyak dijangkau sebagai sumber informasi sebab mudah diakses kapanpun dan dimana saja. Berdasarkan survei yang dilakukan *Nielsen Costumer Media View* di Indonesia, internet menjadi pilihan yang cukup tinggi dengan tingkat penetrasi 44% dibandingkan dengan media lainnya (Nielsen.com, n.d.). Media memegang andil dalam membingkai maupun menggiring pandangan dan opini masyarakat terhadap suatu peristiwa. Ada dua potensi besar media yaitu memberikan kesempatan pada kedua belah pihak yang berkonflik untuk damai, atau justru menambah rumit keadaan (Rengkaningtiyas, 2017).

Matematikawan asal Norwegia. Beliau menyampaikan tentang “Konflik dan Jurnalisme Damai” saat mengajar di Taplow Court (United Kingdom) pada tahun 1970an. Berawal dari perhatian Galtung yang melihat bahwa banyaknya pemberitaan yang justru mengusung peran-peran negatif dan membuat konflik semakin memanas, daripada memberi resolusi yang lebih baik. Sejak saat itu Jurnalisme Damai mulai berkembang dan banyak seminar serta pelatihan-pelatihan yang dihadiri oleh jurnalis, pakar media, maupun mahasiswa (Ciftcioglu, 2017). Bagi Jake Lynch dan McGoldrick jurnalisme perdamaian adalah pelaporan serius, ingin tahu, profesional, mejadikan konflik lebih transparan. Pengertian lain dari jurnalisme perdamaian ialah momen dimana editor dan reporter membuat pilihan soal hal apa yang akan dilaporkan dan bagaimana melaporkannya, sehingga dapat menciptakan perdamaian, atau mengatasi konflik tanpa kekerasan.

Ada tiga hal penting dalam Jurnalisme Damai, seperti yang sudah dijelaskan Lynch and McGoldrick yaitu (Seputro, 2019); a) Wawasan luas dalam memandang dan menganalisa sebuah konflik, kemudian merubahnya menjadi konsep yang seimbang, adil, dan akurat dalam melaporkan peristiwa; b) membuat cara baru dalam pemetaan hubungan antara jurnalis, sumber, tulisan yang dibuat, dan juga konsekuensi yang timbul akibat pemilihan bentuk jurnalismenya; c) membangun kesadaran bahwa pentingnya fokus pada anti kekerasan yang dituangkan dalam kegiatan sehari-hari jurnalis. Media yang lebih berfokus pada korban konflik, mengutamakan penyelesaian, resolusi, perdamaian, rekonstruksi dan rekonsiliasi saat ini dikenal sebagai Jurnalisme Damai. Bagi Johan Galtung, Jurnalisme Damai adalah jurnalisme yang berdiri diatas nama kebenaran, menolak propaganda dan kebohongan, dimana kebenaran itu dilihat dari beragam sisi yang bukan hanya dari sisi ‘kita’ saja. Ada 4 orientasi dalam prinsip Jurnalisme Damai yaitu Orientasi perdamaian, Orientasi kebenaran, Orientasi masyarakat dan Orientasi penyelesaian (Seputro, 2019).

Kompas.com salah satu media online yang cukup gencar pemberitaan tentang peristiwa ini dari berdasarkan konsep Jurnalisme Damai. Misalnya konsep jurnalisme Damai yang Orientasi Perdamaian. Berita Kompas.com dengan judul “*Kudeta Myanmar: Militer Merayakan, Investor Khawatir, Dunia Mengecam*” edisi 1 Februari 2021. Kompas.com melihat konflik kudeta dari sisi kemanusiaan, di mana hal ini menyangkut hidup dan keselamatan banyak orang seperti aktivis, kritikus militer, dan masyarakat lain yang saat ini ditahan. Jurnalisme damai yang berorientasi masyarakat. Berita Kompas.com dengan Judul berita Kompas.com “*Pembangkangan Sipil Makin Menguat di Myanmar, Dokter dan Staf Medis Ambil Bagian*” edisi 3 Februari 2021. Pada berita ini mengarah pada orientasi masyarakat. Sebab menjelaskan bagaimana akar masalah, dan menyebutkan kerugian konflik, yaitu penjatuhan sanksi kembali dari Amerika Serikat yang sebelumnya sudah dicabut, dan menghentikan dana bantuan yang selama ini diberikan untuk mendukung demokrasi di negara

Myanmar. Jurnalisme damai yang berorientasi Penyelesaian. Berita Kompas.com dengan Judul berita Kompas.com “*Indonesia dan Malaysia Dorong Pertemuan ASEAN Bahas Kudeta Myanmar*” edisi 5 Februari 2021. Berita ini sudah mengarah pada orientasi penyelesaian. Dilihat dari Kompas.com yang menyoroti inisiatif damai atau prakarsa perdamaian, dalam hal ini pihak Indonesia dan Malaysia yang berinisiatif mengutus dua menteri luar negeri masing-masing negara untuk mengusulkan diadakannya pertemuan ASEAN membahas soal Kudeta demi mencegah lebih banyak perang. Artikel ini melihat bagaimana Kompas.com memberitakan peristiwa 1 Februari 2021 tentang pihak militer kembali merebut kendali negara Myanmar setelah partai NLD dinyatakan menang dalam pemilu. Junta militer menuding adanya kecurangan dalam proses pemilu, dan menuntut diadakannya pemilihan ulang. Tokoh-tokoh besar seperti Suu Kyi dan pejabat NLD pun akhirnya ditahan dari sudut pandang Jurnalisme damai.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif adalah metode penelitian yang menjabarkan keadaan fenomena berbentuk kalimat-kalimat, gambaran, rekaman, yang memetakan satu demi satu variabel yang ada (Rakhmat, 2017). Lalu, pendekatan kualitatif memfokuskan pada makna dari fenomena yang sedang terjadi dan biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kualitatif sifatnya umum dan cenderung berubah-ubah sesuai dengan situasi dilapangan (Rukin, 2019). Artikel ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk mengidentifikasi isu dan aspek khusus apa yang ditonjolkan dari realitas yang sedang terjadi (Mubaraq, 2020). Pada model Entman ada empat aspek rumusan yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan isi berita agar menjadi lebih jelas dan mempermudah pengolahan data. Empat aspek ini diantaranya ada; Pengidentifikasian Masalah (*Define Problem*), Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (*Diagnose Causes*), Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*), dan Menekankan Permasalahan (*Treatment Recommendation*) (Mubaraq, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Berita Edisi: 1 Februari 2021 dengan judul Setelah Ambil Alih Myanmar, Ini Janji Pihak Militer

Dalam hal pengidentifikasian masalah, Kompas.com melihat kudeta ini terjadi sebagai akibat *denial* atau penyangkalan militer. Ketidakmampuan dan tidak-terimanya pihak militer yang kalah telak dalam Pemilihan Umum yang diadakan pada 8 November 2020. Di mana, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) adalah pemenang suara rakyat. Pada paragraf tersebut, Kompas.com dengan jelas menyebutkan kekalahan pihak militer dalam pemilu sebagai suatu hal yang sangat memalukan, mencoreng nama baik militer yang lebih lama berkuasa di Myanmar dibandingkan dengan pemerintahan sipil yang baru satu dekade saja. Jika dihubungkan dengan jurnalisme damai yang berorientasi Masyarakat dengan indikator *akar masalah*, melihat sebab dan akibat terjadinya konflik. Di mana sumbu awal terjadinya konflik adalah militer yang tidak dapat menerima kekalahan pada hasil pemilu di November 2020. Kemudian, dengan adanya diksi “Karena tidak bisa menerima jika mereka kalah secara memalukan, maka militer pun melakukan kudeta pada Senin dini hari. Juga terlihat adanya opini subyektif dari Kompas.com. Sebab tidak di dukung dengan tanggapan membenaran dari pihak militer sendiri. Jadi pada berita ini Kompas.com sudah menerapkan Orientasi Masyarakat (Akar masalah), namun belum menerapkan Orientasi Perdamaian, Kebenaran, dan Penyelesaian.

Terjadinya aksi kudeta Myanmar berawal dari klaim kecurangan Tatmadaw pada hasil pemilu 8 November 2020. Ini menjadi akar masalah alias sumber masalah pada berita ini. Sama halnya pada poin *pendefinisian masalah*, Kompas.com menampilkan pihak militer sebagai pihak yang arogan, tidak mau menerima kenyataan bahwa pada dasarnya mereka sudah kalah di hasil Pemilihan Umum tersebut namun justru bertindak menyalahkan pihak oposisi. Keputusan moral yang dibuat Kompas.com pada berita dengan judul Setelah Ambil Alih Myanmar, Ini Janji Pihak Militer, pihak militer akhirnya menahan para pemimpin sipil salah satunya Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint. Lalu mengumumkan keadaan darurat yang akan berlangsung selama satu tahun kedepannya. Tidak hanya itu, militer juga mengangkat mantan Jenderal Myint Swe kembali, sebagai pejabat presiden Myanmar. Pada elemen ini Kompas.com telah menerapkan Orientasi Perdamaian, Orientasi Masyarakat (Pelaku Konflik) dan Orientasi Kebenaran, namun belum menerapkan Orientasi Penyelesaian.

Sementara itu, dalam mengungkap penyelesaian, Kompas.com menekankan penyelesaian pada berita ini dengan menampilkan janji pihak militer yang akan mengembalikan kekuasaan pemerintahan Myanmar pada pihak yang menang, setelah melakukan Pemilihan Umum ulang. Dalam hal ini, Kompas.com telah menerapkan tiga unsur Jurnalisme Damai yaitu Orientasi Masyarakat (Narasumber), Orientasi Penyelesaian (Resolusi konflik), dan Orientasi Kebenaran. Namun belum menerapkan dua unsur lainnya seperti Orientasi Perdamaian dan Orientasi Kebenaran. *Resolusi* yang ditampilkan adalah janji militer yang akan melakukan pemilu ulang, seperti yang sudah peneliti jabarkan diatas. Lalu, meskipun tidak disebutkan nama tokoh dengan jelas namun Kompas.com sudah memberikan ruang kepada pihak militer memberikan *statement*. Artinya Kompas.com juga sudah menerapkan *Orientasi Masyarakat* dengan indikator *narasumber*. Kompas.com memberi ruang untuk aktor yang berkonflik bersuara. Militer menjanjikan akan mengadakan pemilihan umum ulang yang lebih baik, dan menyerahkan kekuasaan pada partai yang menang nantinya.

Penemuan ini sejalan jika dibandingkan dengan kajian terdahulu, seperti dalam artikel Bend Abidin Santosa dalam Jurnal ASPIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi dengan judul “Peran Media dalam Mencegah Konflik”. Bahwasanya benar, media massa punya peran besar dalam mempengaruhi khalayak dan opini publik dan dapat menanamkan toleransi saat terjadi konflik (Santosa, 2017). Kompas.com dengan jelas menyebutkan militer yang bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi, dan berhasil membuat dunia berang pada militer Myanmar. Namun, Kompas.com secara bersamaan juga menegaskan penyelesaian dengan menonjolkan *statement* janji militer yang akan mengembalikan pemerintahan seperti semula. Kemudian, Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, dari artikel yang ditulis Raden Wahyu Utomo Martianto dan Umaimah Wahid berjudul “Jurnal Damai Pemberitaan Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat pada Teks Media Asing”, lebih membongkai konflik di Papua Barat sebagai bentuk referendum kemerdekaan (Martianto & Wahid, 2021), sedangkan Kompas.com lebih membongkai konflik sebagai hasil dari *denial*-nya kelompok militer Myanmar. Yang mana kedua hal ini sama-sama keputusan yang mempengaruhi keadaan suatu negara.

Berita Edisi: 1 Februari 2021 dengan judul Keluarkan Imbauan untuk WNI di Myanmar, Kemlu: Tetap Tenang dan Waspada

Dilihat dari pendefinisian masalah pada berita ini, pada awal penulisan berita langsung merujuk pada himbauan pemerintah Indonesia yang disampaikan kementerian luar negeri melalui akun resminya di Twitter. Himbaun ini dimaksudkan agar Warga Negera Indonesia (WNI) yang sedang berada di Myanmar agar tetap tenang, waspada, dan tidak keluar rumah jika tidak benar-benar penting. Dalam hal ini Kompas.com menerapkan unsur Jurnalisme

Damai Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik) dan Orientasi Kebenaran, namun belum diterapkan Orientasi Perdamaian dan Penyelesaian. Bukti diterapkannya *Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik)*, Kompas.com menghadirkan Menteri Luar Negeri Indonesia di Yangon yang memastikan keamanan warga Indonesia yang saat ini berada di Myanmar. Ia menghimbau agar WNI bersikap tenang namun tetap waspada dan cermat mengingat situasi yang saat ini di Myanmar yang sedang kacau.

Adapun sumber masalah yang akhirnya membuat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengeluarkan himbuan untuk tenang dan hati-hati. Artinya akan lebih banyak kekacauan yang mungkin akan terjadi di sana, dan tentu akan membahayakan warga Indonesia yang sedang bertugas atau bekerja di Myanmar. Kompas.com pada poin diatas sudah menerapkan *Orientasi Masyarakat (akar masalah)* dan *Orientasi Kebenaran*, sebab menjelaskan bagaimana akar konflik terjadi berdasarkan fakta yang ada. Namun, belum diterapkannya unsur Orientasi Perdamaian dan Penyelesaian. Nilai moral yang dibuat Kompas.com dalam berita ini ialah militer Myanmar yang mengangkat seorang Jenderal sebagai Pelaksana Tugas (PLT) untuk menjadi presiden Myanmar. Kompas.com juga menyebutkan bahwa bagi militer, langkah yang diambil untuk mengurus negara sudah tepat sebagai wujud menjaga stabilitas negara. Padahal, pemimpin dan pejabat negara sesungguhnya (sah sesuai hasil pemilu) sudah mereka tangkap pada 1 Februari. Kompas.com menunjukkan sisi pihak militer yang terlihat mencari kesempatan untuk menguasai negara.

Solusi dari masalah yang ada, menjelang akhir tulisan berita Kompas.com menuliskan layanan pengaduan yang dapat warga Indonesia hubungi jika suatu waktu terjadi masalah. Melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Myanmar, pemerintah Indonesia menyediakan layanan pengaduan bagi warga Indonesia yang mungkin membutuhkan bantuan ditengah terjadinya kudeta tersebut. Warga negara Indonesia dapat menghubungi lewat telfon, surat elektronik, atau bisa ke pengaduan WNI Kementerian Luar Negeri. Ini menunjukkan kesiap-siagaannya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negaranya yang sedang berada di wilayah konflik. Sekaligus Kompas.com juga menunjukkan kepada pembaca betapa seriusnya persoalan kudeta militer yang ada di Myanmar ini hingga ada layanan pengaduan khusus bagi warga Indonesia yang tinggal di sana.

Pada judul berita tentang Keluarkan Imbauan untuk WNI di Myanmar, Kemlu: Tetap Tenang dan Waspada Kompas dianggap menerapkan Orientasi Perdamaian, Orientasi Penyelesaian (Resolusi konflik), Orientasi Masyarakat, dan Orientasi Kebenaran. *Orientasi Perdamaian* sebab melihat bentuk lain dari konflik yaitu sebuah resolusi (*Orientasi Penyelesaian*) yang berasal dari KBRI Yangon selaku *tokoh bijak di luar konflik (Orientasi Masyarakat)* yang mana hal ini tidak menggunakan kekerasan, dengan menonjolkan *hotline* pengaduan yang dibuat bagi WNI yang mengalami kesulitan di masa kudeta. *Orientasi Kebenaran* sebab menyajikan kebenaran.

Jika dibandingkan dengan kajian terdahulu, misalnya pada Jurnal karya Rieka Mustika dari Jurnal Penelitian Komunikasi mengenai “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook”, yang melihat Kompas.com sebagai media yang fokus pada ideologi humanismenya (Mustika, 2017). Sama seperti pada artikel ini mendapati bahwa Kompas.com memang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memandang konflik kudeta Myanmar sebagai masalah yang menyangkut keselamatan dan hajat hidup banyak orang. Terlihat dari penyelesaian yang menekankan adanya layanan aduan bagi warga negara Indonesia yang sedang berada di Myanmar. Kemudian dibandingkan dengan Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, dari artikel yang ditulis Raden Wahyu Utomo Martianto dan Umaimah Wahid berjudul “Jurnal Damai Pemberitaan Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat pada Teks Media Asing”, pada media *reuters.com* ia mendefinisikan konflik yang ada sebagai bentuk unjuk rasa warga Papua. Hal ini lebih kepada Jurnalisme

Perang (Martianto & Wahid, 2021). Sedangkan temuan pada artikel ini, media Kompas.com lebih mengarah kepada orientasi perdamaian.

Berita Edisi: 2-3 Februari 2021 dengan Kudeta Myanmar Hari Kedua: Tentara Duduki Yangon, AS Ancam Sanksi

Definisi masalah di berita ini terlihat langsung di awalan pemberitaan Kompas.com. Yaitu para jenderal militer yang dengan kuat mencengkram kekuasaan di Myanmar. Dengan kekuatan dan andilnya dalam pemerintahan selama ini, militer dengan mudahnya menguasai serta menangkap pejabat-pejabat tinggi sekaligus presiden. Aung San Suu Kyi yang selama ini menjadi wajah Myanmar pun tak luput dari genggamannya. Suu Kyi ditahan pada dini hari 1 Februari 2021. Kompas.com membingkai pihak militer sebagai sosok yang superioritas. Kompas.com menerapkan Orientasi Masyarakat (Pelaku konflik), Orientasi Perdamaian dan Orientasi Kebenaran, namun belum menerapkan Orientasi Penyelesaian. Bukti penerapan *Orientasi Masyarakat* dengan indikator *pelaku konflik* adalah dengan penyebutan tokoh-tokoh konflik kudeta seperti para Jenderal Militer Myanmar, dan Aung San Suu Kyi. Kompas.com memandang masalah ini sebagai sesuatu yang harus segera dicari penyelesaiannya sebab melihat kekuatan militer yang kuat, dapat menguasai Myanmar hanya dalam waktu singkat. Hal ini mengindikasikan diterapkannya *Orientasi Perdamaian*. Semua fakta disajikan maka telah diterapkan *Orientasi Kebenaran*.

Dilihat dari sumber masalah kecurangan dalam pelaksanaan dan hasil pemilihan umum pada November 2020 menjadi alasan sumber masalah terjadinya kudeta Myanmar kali ini. Kompas.com memperlihatkan ketidakpercayaan diri pihak militer karena hasil pemilu yang hampir seluruhnya milik Partai National League for Democracy (NLD). Yang artinya, militer seharusnya sudah kalah dan tidak sepatutnya memegang kekuasaan negara. Namun, tepat sebelum pergantian parlemen dibuka, Junta Militer lebih dahulu menangkap Suu Kyi serta pejabat negara resmi lainnya di tanggal 1 Februari 2021. Kebenaran soal penangkapan ini juga dibuktikan dari ditampilkannya kutipan langsung salah satu warga Myanmar yang menyebut Suu Kyi saat ini berada di tangan mereka (militer).

Pada elemen Entman diatas menunjukkan telah diterapkannya dua indikator dari unsur Orientasi Masyarakat yaitu Akar masalah dan Narasumber. Namun peneliti melihat Kompas.com belum menerapkan Orientasi Perdamaian, Kebenaran dan Penyelesaian. Dengan dijelaskannya tuduhan kecurangan pada pemilu itu sudah menjadi bukti diterapkannya *Orientasi Masyarakat (Akar masalah)*. Lalu, dengan ditampilkannya salah satu kutipan langsung dari masyarakat yang membenarkan tentang penangkapan Suu Kyi, meskipun tidak disebutkan secara jelas siapa nama tokoh tersebut, Kompas.com sudah menerapkan indikator *narasumber*. Sebab memberi ruang pada mereka yang tidak dapat bersuara, untuk mengeluarkan suaranya.

Legitimasi dari dua poin sebelumnya, Kompas.com menampilkan tanggapan dari juru bicara Myo Nyunt kepada Agence France-Presse (AFP) yang membenarkan adanya peristiwa penangkapan tokoh-tokoh penting Myanmar saat dini hari di 1 Februari 2021 itu. Tak hanya itu militer memperketat penjagaan jalanan di sekitar Naypyidaw dengan menurunkan bala tentara, truk dan tank-tank, serta helikopter. Kompas.com telah menerapkan unsur Jurnalisme Damai *Orientasi Perdamaian*, dengan menggambarkan bagaimana situasi mencekam, kuat dan solidnya pihak militer Myanmar bahkan tampak sulit untuk dilawan. Kompas.com melihat kudeta sebagai masalah yang harus dicari segera penyelesaiannya. Kompas.com juga sudah menerapkan *Orientasi Kebenaran* sebab menyajikan fakta keadaan dilapangan. Kompas.com pada poin ini belum menerapkan Orientasi Masyarakat, dan Orientasi Penyelesaian.

Kompas.com menekankan pada akhir berita seruan pemulihan kembali Myanmar pada sistem demokrasi seperti satu dekade sebelumnya. Amerika Serikat juga memperingati bahwasanya mereka bisa saja menjatuhkan sanksi tegas seperti yang sebelumnya pernah diterapkan (namun sudah dicabut kembali) pada Myanmar. Kompas.com menampilkan AS sebagai negara adidaya yang dapat memberi sanksi ataupun pengaruh tertentu pada yang ia kehendaki. Namun tidak hanya AS, juga ada tanggapan dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Uni Eropa, Australia yang turut mengecam aksi kudeta. Ditampilkannya Amerika Serikat membuktikan bahwa Kompas.com sudah menerapkan *Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik)* yang menyerukan demokrasi segera (*Orientasi Perdamaian*), *Orientasi Penyelesaian* berupa *resolusi* rencana penjatuhan sanksi pada Myanmar dan *Orientasi Kebenaran*. Artinya pada elemen ini Kompas.com sudah menerapkan semua unsur Jurnalisme Damai.

Jika dibandingkan dengan kajian terdahulu, karya Rieka Mustika dari Jurnal Penelitian Komunikasi mengenai “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook”, pada penelitian tersebut menekankan nilai moral bahwasanya pelaku harus diberi hukuman yang dapat membuat mereka jera dan tidak melakukan tindak pelecehan kembali (Mustika, 2017). Sama dengan penemuan pada artikel ini, pada intinya Kompas.com sebagai media berusaha menampilkan nilai moral yang dapat sekiranya membuat efek jera pada pelaku, dalam konteks penelitian ini, yakni kelompok militer Myanmar yang akan mendapatkan sanksi kembali dari Amerika Serikat.

Kemudian jika dibandingkan dengan Jurnal karya Christiany Juditha dari Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik tentang “Jurnalisme Damai dalam Berita Konflik Agama Tolikara di Tempo.co”, pada penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian besar berita yang dimuat Tempo.co mengarah pada orientasi perdamaian dengan menonjolkan akar masalah, menampilkan pelaku, serta tokoh-tokoh bijak di luar dari konflik (Juditha, 2016). Hal tersebut sama dengan yang ditemukan di media Kompas.com, di mana Kompas.com lebih menitikberatkan penerapan *Orientasi Masyarakat* pada indikator tokoh bijak di luar konflik dan akar masalah dalam mengorientasikan perdamaian pada konflik.

Berita Edisi 3 Februari 2021 Judul Berita tentang Pembangkangan Sipil Makin Menguat di Myanmar, Dokter dan Staf Medis Ambil Bagian

Kompas.com mendefinisikan kudeta sebagai masalah yang sudah mulai mendapatkan perhatian besar di masyarakat Myanmar. Kompas.com menunjukkan bahwa masyarakat Myanmar sudah mulai berani menyuarakan pendapat dan menentang rezim militer yang seharusnya tidak ada, melainkan pemerintahan sipil sebagaimana yang mereka inginkan, dan dihasilkan saat pemilu 2020 lalu. Masyarakat yang awalnya hanya diam, kini mulai membuat aksi maupun kampanye-kampanye. Bahkan protes kali ini berasal dari kelompok medis yang pada dasarnya adalah kelompok yang sangat dibutuhkan di era pandemi covid-19. Banyak pihak medis yang melakukan mogok kerja terkecuali pada saat ada kasus medis yang benar-benar *urgent*. Keberanian ini Kompas.com tampilkan sebagai suatu hal yang tak lepas dari ‘jasa’ Amerika Serikat yang sebelumnya sudah menegaskan secara resmi bahwa apa yang dilakukan militer adalah tindakan ilegal dan merupakan kudeta pada pemerintahan negara sendiri.

Pada perangkat *framing* satu ini, diterapkan unsur Jurnalisme Damai *Orientasi Penyelesaian (Inisiatif damai)* dari kalangan masyarakat. Upaya inisiatif ini ditampilkan dengan seruan-seruan kampanye di jalanan Myanmar. Jadi, Kompas.com sudah menerapkan dua orientasi yakni *Orientasi Penyelesaian* dan *Orientasi Kebenaran*. Sementara dua lainnya belum diterapkan; *Orientasi Perdamaian* dan *Orientasi Masyarakat*. Min Aung Hlaing adalah panglima militer Myanmar yang dibingkai Kompas.com sebagai sumber masalah terjadinya kudeta. Ini

ditulis dalam subjudul pertama “Warisan Militer yang Mematikan”. Min Aung Hlaing mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala kabinet baru Myanmar. Kompas.com menunjukkan keangkuhan pihak militer yang dengan tanpa pertimbangan dan tanpa mendengarkan bagaimana kemauan rakyat Myanmar, dengan tergesa-gesa menunjuk diri sendiri sebagai pemimpin negara. Ia berdalih aksi kudeta yang dilakukan adalah tindakan benar, dan sebagai akibat dari diabaikannya suara militer terhadap sipil.

Kompas.com menerapkan Orientasi Masyarakat (Pelaku konflik dan Narasumber) dan Orientasi Kebenaran, serta belum menerapkan Orientasi Perdamaian dan Penyelesaian. *Pelaku konflik* disebutkan dengan jelas yakni ada Min Aung Hlaing selaku Panglima Militer yang telah mengangkat dirinya sendiri sebagai kepala kabinet yang baru. Kemudian fakta ini (*Orientasi Kebenaran*) juga diiringi dengan pembenaran dari *narasumber* terkait. Nilai moral yang disampaikan Kompas.com adalah perlawanan masyarakat terhadap rezim yang zalim. Meskipun seharusnya, bukan rezim militer lah yang memerintah pada saat itu. Kompas.com menampilkan bentuk-bentuk perlawanan dari masyarakat khususnya staf medis yang berada dibawah naungan negara, bahwa “mereka juga bisa melawan”. Bahwa mereka “menolak rezim militer”.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa Kompas.com sudah menerapkan Orientasi Masyarakat (Narasumber), Orientasi Penyelesaian (Inisiatif damai) dan Orientasi Kebenaran. Pada *Orientasi Masyarakat (Narasumber)* Kompas.com menghadirkan tokoh dari kalangan masyarakat yang menyuarakan penolkan pada rezim militer dan menginginkan pemerintahan sipil yang mereka pilih. Upaya *inisiatif damai* yang ditonjolkan Kompas.com adalah penggunaan pita merah dan salam tiga jari oleh tim medis, dan mogok kerja non-darurat sebagai bentuk protes masyarakat. Semua fakta disajikan, maka ini adalah bukti diterapkan pula *Orientasi Kebenaran*. Solusi dari permasalahan yang sedang terjadi, Kompas.com menekankan penyelesaian yang berasal dari Amerika Serikat yang dengan tegas mengatakan bahwa yang dilakukan oleh militer Myanmar adalah hal yang salah, dan merupakan tindakan kudeta. Dengan demikian AS bisa saja menjatuhkan sanksi berat kepada militer Myanmar dan menghentikan bantuan dana yang tujuannya adalah demi kemajuan demokrasi di Myanmar. Lalu, Kompas.com juga menampilkan usaha dari pihak PBB yang ingin mengadakan pertemuan darurat untuk mengutuk kudeta yang sedang terjadi di Myanmar, namun masih belum berhasil sebab belum mendapatkan dukungan dari pihak China. Peneliti melihat sekali lagi, Kompas.com menampilkan Amerika Serikat dengan ‘adi dayanya’ yang bisa kapan pun menjatuhkan sanksi pada militer Myanmar jika masih melangsungkan kudeta.

Penjelasan diatas mengartikan Kompas.com telah menerapkan keempat unsur Jurnalisme Damai yaitu Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik dan Kerugian konflik), Orientasi Penyelesaian (Resolusi konflik) Orientasi Perdamaian dan Orientasi Kebenaran. Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB tampil sebagai *tokoh bijak di luar konflik*. Amerika Serikat yang tidak bisa membantu negara Myanmar dengan bantuan dana lagi sebagai bentuk *kerugian konflik*. Lalu, PBB yang berusaha untuk mencari jalan damai dengan *resolusi* sebuah pengadaan pertemuan bersama membahas kondisi Myanmar. Kompas.com juga menekankan bahwa aksi yang dilakukan militer Myanmar adalah sebuah ‘tindak kudeta’. Bersama itu Kompas.com artinya telah memandang konflik ini sebagai masalah yang harus segera diselesaikan (*Orientasi Perdamaian*), mengingat kudeta bukan hal kecil yang dapat diabaikan begitu saja. Kompas.com telah menyajikan semua fakta (*Orientasi Perdamaian*) dan tidak terdapat opini subyektif wartawan.

Berita ini dapat dilihat bagaimana Kompas.com berusaha untuk menerapkan teori Jurnalisme Damai dalam pemberitannya. Di mana, hal ini sejalan dengan gagasan Johan Galtung, bahwa teori Jurnalisme Damai berusaha untuk mengusung nilai-nilai negatif menjadi positif dengan menekankan berbagai resolusi yang lebih baik. Kompas.com memperlihatkan

perjuangan dan gagasan damai yang dilakukan dari berbagai pihak baik dari kalangan masyarakat, maupun dari pihak luar seperti Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berita Edisi 4 Februari 2021 Judul Berita Pastikan Kudeta Myanmar Gagal, Sekjen PBB Akan Menggalang Tekanan secara Global

Identifikasi masalah yang dibingkai Kompas.com pada berita ini adalah kudeta di Myanmar sebagai peristiwa yang krisis. Hingga membuat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan untuk menyelesaikan hal ini. Antonio Guterres berjanji akan menekan pihak Junta militer Myanmar agar kudeta dapat berhenti alias gagal. Secara tidak langsung Kompas.com menyampaikan pada pembaca bahwa persoalan kudeta yang terjadi di Myanmar bukan hal kecil yang dapat selesai dalam sekejap mata. Kompas.com sudah menerapkan keempat unsur Jurnalisme Damai. Antonio Guterres selaku *tokoh bijak di luar konflik* yang mengupayakan usaha perdamaian dengan berniatif (*Orientasi Penyelesaian*) memobilisasi pihak internasional untuk menggagalkan kudeta Myanmar. Karena telah menyoroti bentuk lain dari kudeta yang tidak menggunakan kekerasan, maka artinya Kompas.com juga sudah menerapkan *Orientasi Perdamaian*. Kebenaran peristiwa menandakan diterapkannya unsur *Orientasi Kebenaran*. Jadi, Kompas.com telah menerapkan unsur Jurnalisme Damai yaitu Orientasi Perdamaian, Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik), Kebenaran dan Penyelesaian (Inisiatif damai).

Klaim kecurangan saat pemilu lagi-lagi menjadi sumber masalah yang dibingkai oleh Kompas.com. Klaim kecurangan ini peneliti lihat sebagai 'kesempatan' bagi militer untuk mengambil kekuasaan negara dengan cara kilat. Padahal hal itu sendiri belum terbukti kebenarannya. Apakah Partai NLD benar-benar curang atau tidak. Kompas.com menerapkan Orientasi Masyarakat (Akar masalah, Pelaku konflik) dan Orientasi Kebenaran, tetapi belum menerapkan Orientasi Perdamaian dan Penyelesaian. Kompas.com menyoroti *akar masalah* terjadinya konflik kemudian menyebutkan *pelaku konflik* dengan jelas yakni Min Aung Hlaing. Kebenaran telah disajikan dan menjadi bukti diterapkannya *Orientasi Kebenaran*. Nilai moral yang dihadirkan Kompas.com sebagai legitimasi poin *define problems* dapat kita lihat dari kutipan langsung dari Guterres dalam wawancaranya kepada The Washington Post yang menunjukkan kemurkaannya atas tindakan yang dilakukan militer pada negaranya sendiri. Dari sini dapat dilihat pula keberpihakan Guterres pada Suu Kyi. Ia menyalahkan kebaikan Suu Kyi dengan militer sehingga menjadi celah bagi militer merebut kekuasaan di Myanmar.

Kompas.com menerapkan Orientasi Kebenaran dan Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik dan Pelaku konflik), namun belum menerapkan Orientasi Perdamaian dan Penyelesaian. *Orientasi Kebenaran* disajikan dengan menyoroti fakta-fakta yang ada salah satunya Guterres yang sangat berang pada militer Myanmar. Guterres juga hadir sebagai *tokoh bijak di luar konflik* yang peduli pada konflik kudeta yang sedang terjadi di Myanmar. Kompas.com dalam penulisan beritanya ini juga menyebutkan tokoh yang terlibat konflik seperti militer dan Aung San Suu Kyi. Solusi penyelesaian dalam berita ini adalah permintaan Guterres yang ingin semua orang yang ditahan oleh militer selama kudeta terjadi harus segera dibebaskan, dan mengembalikan konstitusi seperti semula. Sebelum menutup beritanya, Kompas.com juga menegaskan lewat kalimat langsung Guterres bahwa kudeta, atau jalan kekerasan bukan lah jalan yang benar atau baik untuk memerintah suatu negara. Ini menunjukkan keberpihakannya Kompas.com pemerintahan yang bersih dan demokrasi.

Kompas.com menerapkan unsur Jurnalisme Damai yakni Orientasi Penyelesaian (Resolusi konflik), Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik) dan Orientasi Kebenaran. Tetapi, Kompas.com belum menerapkan Orientasi Perdamaian. Guterres selaku

tokoh bijak di luar konflik yang turut peduli pada konflik di Myanmar. Guterres merancang pertemuan PBB membahas hal tersebut, dan menjadi bukti diterapkannya *Orientasi Penyelesaian (Resolusi konflik)*. Kompas.com menyajikan fakta yang diiringi hadirnya tokoh terkait, yang artinya telah diterapkan unsur *Orientasi Kebenaran*.

Jika dibandingkan dengan Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, dari artikel yang ditulis Raden Wahyu Utomo Martianto dan Umaimah Wahid berjudul “Jurnal Damai Pemberitaan Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat pada Teks Media Asing”, pada media *reuters.com* ia menekankan penyelesaian dengan menggalakkan Deklarasi Sementara Papua dan berusaha mengimbangnya dengan pernyataan menlu Indonesia yang tetap menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia (Martianto & Wahid, 2021). Sedangkan pada penelitian ini, semua mengarahkan pada ‘militer harus mengembalikan situasi ke semula’ di mana pemerintahan sipil yang berkuasa. Jika tidak, semua sanksi dan hukuman akan dijatuhkan pada myanmar. Namun tetap dengan beberapa pertimbangan yang menyangkut humanisme.

Berita Edisi 5 Februari 2021 Judul Berita Indonesia dan Malaysia Dorong Pertemuan ASEAN Bahas Kudeta Myanmar

Pada judul berita “Indonesia dan Malaysia Dorong Pertemuan ASEAN Bahas Kudeta Myanmar” Kompas.com membingkai bahwa masalah kudeta tidak hanya menarik perhatian dunia, namun juga tetangga sendiri alias negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia selaku ‘tetangga’ dari negara Myanmar juga turut menaruh rasa simpati dan empati pada apa yang sedang terjadi. Kompas.com menunjukkan bahwa masalah kudeta yang sedang terjadi di Myanmar diibaratkan sebagai masalah ‘keluarga’ yang harus sama-sama dibantu penyelesaiannya. Oleh karenanya Presiden Indonesia bersama-sama dengan Perdana Menteri Malaysia tidak tinggal diam, lalu mendorong diadakannya pertemuan khusus negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Telah diterapkan keempat unsur Jurnalisme Damai yaitu Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik), Orientasi Penyelesaian (Resolusi konflik), Orientasi Kebenaran hingga Orientasi Perdamaian. Indonesia dan Malaysia sebagai *tokoh bijak di luar konflik* yang mengupayakan sebuah *resolusi* berupa pertemuan seluruh Menteri Luar Negeri se-ASEAN untuk membahas terkait situasi terkini di Myanmar. Narasi yang ditulis Kompas.com sesuai dengan fakta alias berorientasi pada *Orientasi Kebenaran*, dan membentuk *angle* pembahasan yang mengarah pada *Orientasi Perdamaian*. Sumber masalah yang diidentifikasi Kompas.com adalah masih soal kecurangan pemilu yang diadakan pada November 2020 lalu, Di mana dari hasil pemilu tersebut dimenangkan oleh partai NLD yang dipimpin oleh Suu Kyi.

Kompas.com telah menerapkan Orientasi Masyarakat (Akar masalah dan Pelaku konflik) dan Orientasi Kebenaran. Sementara itu, Kompas.com belum menerapkan Orientasi Perdamaian dan Orientasi Penyelesaian. Kompas.com menyoroti kembali bagaimana *akar masalah* sesuai fakta (*Orientasi Kebenaran*) terjadinya kudeta militer Myanmar dan menyebutkan nama *pelaku konflik* dengan gamblang seperti Aung San Suu Kyi. Keputusan moral yang ditonjolkan oleh Kompas.com dapat dilihat dari pernyataan Presiden Indonesia Bapak Jokowi, yang menjelaskan bahwa rencana pertemuan sudah disampaikan dan dibahas bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Hassin di Istana Merdeka pada Jumat, 4 Februari 2021. Ini menunjukkan keseriusan dua negara dari anggota ASEAN dalam memandang konflik kudeta Myanmar.

Pada elemen tersebut telah diterapkannya keempat unsur Jurnalisme Damai. *Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik)* dalam hal ini Jokowi selaku presiden Indonesia, yang memiliki inisiatif untuk melakukan pertemuan menlu ASEAN dan sudah membicarakan

rencana ini dengan Perdana Menteri Malaysia, sebagai bentuk diterapkannya *Orientasi Penyelesaian (Inisiatif damai)*. Hal tersebut mengarah pada unsur *Orientasi Perdamaian* yang mana Kompas.com melihat bentuk-bentuk lain dari konflik yang tidak menggunakan kekerasan. Narasi tersebut sesuai dengan fakta (*Orientasi Kebenaran*) dan dibuktikan dengan ditampilkannya tanggapan langsung dari Presiden Indonesia, Jokowi. Penekanan penyelesaian yang ditegaskan Kompas.com adalah pada pernyataan Presiden Jokowi dari sisi menghormati setiap prinsip-prinsip piagam ASEAN. Bagaimana pun, sebagai sebuah ‘keluarga’ prinsip yang sudah disepakati bersama adalah hal yang utama. Pada elemen ini Kompas.com kembali menerapkan *Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik)* dan *Orientasi Kebenaran*, namun tidak dengan *Orientasi Perdamaian* dan *Orientasi Penyelesaian*. Indonesia hadir sebagai *tokoh bijak di luar konflik* yang turut prihatin dan menginginkan perdamaian kembali hadir di negara Myanmar. Hal ini merupakan kebenaran (*Orientasi Kebenaran*) yang juga diiringi dengan tanggapan langsung dari Jokowi.

Berbeda dengan Jurnal Interaksi oleh Rindang Senja Andarini mahasiswa program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro berjudul “Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Ahmadiyah pada Harian Jawa Pos”, pada artikel ditemukan hasil bahwa Harian Jawa Pos belum menerapkan Jurnalisme Damai dalam pemberitaan Ahmadiyah, terlihat dari penggunaan *victimizing* dan *demonizing language* di dalam penulisan berita. Jawa Pos lebih memilih pemberitaan yang mendramatisir, menggunakan “*unfavored*” *frame* dan menyebarkan stigma yang ditujukan pada kelompok Ahmadiyah dan pengikutnya (Andarini, 2014). Sedangkan Kompas.com pada artikel ini, lebih menekankan pada hal positif dimana Indonesia menjadi penggagas dari diadakannya pertemuan anggota ASEAN membahas soal kudeta Myanmar. Kompas.com sudah menerapkan nilai-nilai dari teori Jurnalisme Damai.

Berita Edisi 7 Februari 2021 Judul Berita Paus Fransiskus Angkat Bicara soal Kudeta Myanmar dan Panjatkan Doa

Berita berjudul “Paus Fransiskus Angkat Bicara soal Kudeta Myanmar dan Panjatkan Doa” menunjukkan Kompas.com mendefinisikan masalah kudeta yang ternyata juga menarik perhatian tokoh agama seperti Paus Fransiskus. Meskipun Paus adalah tokoh Katolik, yang mana jika dilihat dari proporsi penduduk di Myanmar sendiri sangat sedikit pemeluk agama tersebut. Secara tidak langsung Kompas.com menyampaikan kepada pembaca bahwa kudeta tidak hanya berdampak bagi kehidupan berpolitik suatu negara melainkan juga bagi kehidupan beragama. Masyarakat yang ingin beribadah tentunya akan merasa terganggu atau takut kalau-kalau ia akan terkena serangan tiba-tiba dari militer. Tokoh Paus ditampilkan sebagai tokoh salah satu agama yang peduli, dan turut mendoakan kebaikan untuk kondisi Myanmar saat ini. Kompas.com menerapkan unsur Jurnalisme Damai yakni *Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik)* dan *Orientasi Kebenaran*, namun belum menerapkan *Orientasi Perdamaian* dan *Penyelesaian*.

Kompas.com memperkirakan sumber masalah dari kejadian ini adalah pihak militer yang melakukan kudeta pada pemerintahan sipil, dan berimbas pada meruaknya demo besar-besaran di beberapa kota Myanmar. Disebutkan juga demo ini menjadi demo terbesar setelah Revolusi Saffron pada 2007 silam, yang sama-sama bertujuan untuk memberikan protes pada rezim militer. Kembali, Kompas.com menampilkan Paus sebagai *tokoh bijak di luar konflik* yang mengindikasikan diterapkannya *Orientasi Masyarakat* dan *Orientasi Kebenaran* pada elemen Entman ini. Namun belum diterapkan *Orientasi Perdamaian* dan *Penyelesaian*. Nilai moral yang disajikan oleh Kompas.com diperkuat dari *statement* Paus Fransiskus yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin Myanmar agar membawa negara ke arah yang lebih baik. Peneliti melihat, hal ini juga sebagai harapan Kompas.com untuk masyarakat di

Myanmar agar mendapatkan pemimpin yang sama-sama menuju pada arah kebaikan. Pada poin Entman satu ini, juga menampilkan Paus Fransiskus dan kutipan langsungnya yang mendoakan kebaikan bagi Myanmar. Hal ini berarti Kompas.com menerapkan *Orientasi Masyarakat (Tokoh bijak di luar konflik)* dan *Orientasi Kebenaran*, namun tidak menerapkan Orientasi lainnya seperti Perdamaian dan Penyelesaian.

Penyelesaian yang ditampilkan Kompas.com bagi peneliti ditunjukkan pada aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Myanmar. Terselip pengharapan hadirnya demokrasi pada negara tercinta mereka, salah satunya dengan pengembalian kekuasaan pada partai NLD selaku partai yang mendapatkan suara terbanyak saat diadakannya pemilu pada November 2020 lalu. Dukungan pada partai NLD ini dapat dilihat dari massa yang melakukan demo di Yangon, mereka membawa balon-balon berwarna merah seperti warna partai NLD. Kompas.com juga menampilkan kutipan-kutipan langsung dari masyarakat yang menunjukkan ketidakberpihakan mereka pada militer yang diktator.

Kompas.com menerapkan keempat unsur Jurnalisme Damai yakni Orientasi Penyelesaian (Inisiatif damai), Orientasi Masyarakat (Narasumber), Orientasi Perdamaian dan Orientasi Kebenaran. Dalam hal ini, Kompas.com menyoroti *inisiatif damai* yang digagas oleh masyarakat yang membawa balon-balon merah saat melakukan aksi di kota Yangon sebagai bentuk protes dan meminta pemerintahan semula kembali. Yang mana, merah bermakna warna partai NLD yang menang pada hasil pemilu 2020 lalu. Kompas.com telah melihat bentuk lain dari konflik yang tidak menggunakan kekerasan (*Orientasi Perdamaian*). Kemudian juga menyajikan berita sesuai fakta (*Orientasi Kebenaran*) yang diiringi dengan tanggapan langsung narasumber dari kalangan masyarakat Myanmar (*Orientasi Masyarakat dengan indikator narasumber*).

Dari penjelasan tersebut, terlihat bagaimana Kompas.com berusaha untuk menerapkan teori Jurnalisme Damai dalam pemberitaan kudeta Myanmar. Selain dengan telah diterapkannya keempat unsur yang ada, penulisan berita juga telah sejalan dengan gagasan Johan Galtung. Kompas.com banyak menekankan poin-poin perdamaian disetiap aspek Orientasi dari Jurnalisme Damai. Sama seperti penemuan pada Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, oleh Ayu Usada Rengkaningtiyas dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika tentang “Jurnalisme Damai (*Peace Journalism*) dalam Kerukunan Antarumat Beragama (Analisis *Framing* Kompas.com terhadap Isu Rohingya) (Rengkaningtiyas, 2017). Pada artikel tersebut ditemukan bahwa Kompas.com telah menerapkan konsep Jurnalisme Damai, dimana perannya adalah untuk menjaga kerukunan antarumat manusia.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Penerapan Jurnalisme Damai pada media *online* Kompas.com terkait pemberitaan kudeta militer di Myanmar dalam kurun waktu 1 hingga 10 Februari 2021, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com meringkai kudeta sebagai masalah krusial yang menyangkut keselamatan banyak nyawa. Kompas.com cenderung mengkonstruksikan berita dengan nada-nada negatif namun bertujuan untuk menggambarkan keadaan mencekam di Myanmar pada publik. Secara umum media Kompas.com menerapkan *unsur-unsur Jurnalisme Damai*. Namun jika ditilik lebih dalam, ada beberapa indikator pada salah satu orientasi yang belum diterapkan. Kompas.com masih terindikasi menerapkan *opini* subyektif dan diksi judul yang mengarah pada provokasi. Hal ini berarti Kompas.com belum sepenuhnya menerapkan Orientasi Kebenaran, yang pada indikatornya menghindari *opini* subyektif dan diksi provokasi itu sendiri.

Referensi

- Andarini, R. S. (2014). Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Ahmadiyah pada Harian Jawa Pos. *Jurnal Interaksi*, 3(1), 85–93.
- Apriyanti, D. (2013). Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013). *Jom Fisip*, 1(2), 1–13.
- Ciftcioglu, V. (2017). *Peace Journalism: A Practical Handbook for Journalists in Cyprus* (M. Bailie (ed.)). Naci Talat Vakf dan IKME. <http://opac.kaltimprov.go.id/opac/detail-opac?id=63743>
- Juditha, C. (2016). Jurnalisme Damai dalam Berita Konflik Agama Tolikara di Tempo.co. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 20(2).
- Kompas.com. (n.d.-a). *Kudeta Myanmar, Sebab dan Apa yang Sebenarnya Terjadi*. Retrieved August 23, 2021, from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi?page=all#page2>
- Kompas.com. (n.d.-b). *Kudeta Myanmar Membuat Lebih dari 200.000 Orang Jadi Pengungsi*. Retrieved June 25, 2021, from <https://www.kompas.com/global/read/2021/06/25/194859170/kudeta-myanmar-membuat-lebih-dari-200000-orang-jadi-pengungsi?page=all>
- Martianto, R. W. U., & Wahid, U. (2021). Jurnal Damai Pemberitaan Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat pada Teks Media Asing. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 5(1).
- Mubaraq, D. F. (2020). *Teks Media Sebuah Pengantar Riset Jurnalistik*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Mustika, R. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 135–148. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159>
- Nielsen.com. (n.d.). *Tren Baru di Kalangan Pengguna Internet di Indonesia*. Retrieved October 5, 2021, from <https://www.nielsen.com/id/en/press-releases/2017/tren-baru-di-kalangan-pengguna-internet-di-indonesia/>
- Rakhmat, J. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Rengkaningtias, A. U. (2017). Jurnalisme Damai (Peace Journalism) dalam Kerukunan Antarumat Beragama (Analisis Framing Kompas.com terhadap Isu Rohingnya). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 163–184.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Santosa, B. A. (2017). Peran Media dalam Mencegah Konflik. *Jurnal ASPIKOM (Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi)*, 3(2).
- Seputro, A. (2019). *Berita Kekerasan Terhadap Suporter (Analisis Framing Terhadap Kasus Haringga pada Acara Mata Najwa & ILC)*. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi.